



BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
RISET DAN
INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
KOTA SAMARINDA

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541)743036 (Protokol) Fax. 731455
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah
 2. Inspektur
 3. Sekretaris DPRD
 4. Camat se-Kota Samarinda
- di-

SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.6.3/021 /013.02

Tentang

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran KemenPAN RB No. 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan ini diminta perhatian Saudara tentang hal hal sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Pengukuran Kinerja dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja serta bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap tahunnya.
2. Dalam proses Pengukuran Kinerja, terdapat tiga tahapan yaitu penetapan data kinerja, pengumpulan data kinerja dan teknis pengukuran kinerja.
3. Tata cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

4. Dalam....

4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja serta pengumpulan data kinerja, hendaknya berpedoman pada Surat Edaran ini.

Demikian untuk mendapat perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal 19 April 2024

Sekretaris Daerah,



Hero Mardanus Satyawan

Tembusan:

Walikota Samarinda sebagai laporan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541)743036 (Protokol) Fax. 731455
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 00.8.6.3/ /013.02

Tanggal : April 2024

Hal : Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Di
Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

A. PENDAHULUAN

➤ LATAR BELAKANG

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Disamping itu "Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.



Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bukanlah suatu aktifitas yang baru, tiap kementerian, unit kerja dan satuan kerja telah di program untuk mengumpulkan informasi kinerja, baik berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

4. Dalam....

Namun, sayangnya dalam pelaporan tersebut lebih banyak berfokus pada capaian kinerja *input* (masukan) seperti banyaknya anggaran dikeluarkan, jumlah tenaga yang dibutuhkan atau lamanya waktu pelaksanaan. Kadangkala ada instansi pemerintah yang telah melaporkan sampai *output* (keluaran) dari kegiatan yang dilaksanakan, misalnya jumlah pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, jumlah naskah yang dihasilkan, dan lain-lain.

Informasi-informasi di atas baik *input* maupun *output* dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun ke depan pelaporan kinerja diharapkan telah bergeser ke hasil (*outcome*) yang telah dicapai dari unit/satuan kerja.

Salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana visi lembaga sudah tercapai maka diperlukan adanya pengukuran dari kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen/pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap performa organisasi dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (*proses*), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Alur kinerja pada Pemerintah Kota Samarinda harus berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan kinerja dilakukan secara *top-down* merujuk pada Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/368/HK-KS/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 2021-2026 dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Eselon III
- Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Perjanjian Kinerja/SKP Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Selanjutnya dari kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara ketercapaian dan target yang telah ditetapkan.

➤ **TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda;
2. Apakah proses bisnis yang diselenggarakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengetahui kekurangan dalam menentukan target kinerja;
4. Mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang telah dilakukan.

➤ **MANFAAT PENGUKURAN KINERJA**

1. Meningkatkan kualitas layanan yang belum optimal serta penentuan *reward* dan *punishment*;
2. Penetapan strategi yang sesuai dengan sasaran kinerja;
3. Penentuan dan alokasi biaya yang tepat untuk mendukung program kegiatan;
4. Sebagai umpan balik pada kemajuan sasaran, jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi maka dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan selanjutnya untuk membuat penyesuaiannya.

➤ **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam kerangka Pengukuran Kinerja terdapat tiga tahapan yaitu penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Kerangka pertama yang perlu dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja adalah menetapkan indikator kinerja. Sebagai unsur terpenting dalam pengukuran kinerja, indikator kinerja yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kriteria penetapan indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja yang ditetapkan haruslah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu 1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja, dan 2) data eksternal, berasal dari luar unit kerja baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang terdiri dari indikator- indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

C. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Dalam melakukan Pengukuran Kinerja, terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, penyeleksian dan penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur tingkat

pencapaian sasaran maupun kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau kegiatan yang telah ditetapkan. karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas dimana dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya bejangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- b) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan intervensi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. karena indikator kinerja memberikan rambu rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya.

- c) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang ditetapkan hendaknya :

- a) Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah interpretasi.
- b) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- c) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- d) Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus mempertimbangkan ketersediaan data mengenai target dan realisasinya.
- e) Mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk terkait dengan masalah biaya.
- f) Mempertimbangkan pelaksanaannya dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam unit kerja sendiri atau data internal dan data yang bersumber dari luar unit kerja sendiri atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)

atas data kinerja. Pada Pemerintah Kota Samarinda, pengukuran data kinerja dilakukan menggunakan aplikasi/sistem informasi yang dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui e-SAKIP Terintegrasi dan e-Dalev.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian penetapan kinerja, tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian penetapan kinerja merupakan tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja unit kerja. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unit kerja yang melakukan pengukuran kinerja. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (*benchmarking*).
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

D. PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing unit kerja, sehingga lebih mengandalkan pada pengukuran keberhasilan unit kerja yang dilakukan secara bejenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Individu.

Pengukuran kinerja di berbagai tingkatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen penetapan kinerja. Berbagai tingkatan itu mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Tingkatan entitas akuntabilitas yang ada di Pemerintah Kota Samarinda dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Entitas akuntabilitas kinerja Kepala Daerah;
- b) Entitas akuntabilitas kinerja eselon II;
- c) Entitas akuntabilitas kinerja eselon III;
- d) Entitas akuntabilitas kinerja eselon IV;
- e) Entitas akuntabilitas kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

Seluruh entitas tersebut wajib menyusun rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan/program, dan memantau realisasi capaian berbagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur terwujudnya *output* atau *outcome*.

- **Pengukuran Kinerja Tingkat Kepala Daerah**

Pengukuran kinerja dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Samarinda. Pengukuran di tingkat Kepala Daerah berfokus untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan dari **sasaran strategis** Pemerintah Kota Samarinda yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran yang berhasil dicapai Pemerintah Kota dengan target indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan tersebut.

- **Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon II**

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-

masing kepala perangkat daerah/asisten/staf ahli dengan Wali Kota. Pengukuran kinerja pada eselon II bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan **sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah** yang telah ditetapkan.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran yang berhasil dicapai unit kerja dengan target indikator kinerja sasaran yang dipejanjikan tersebut.

- Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon III

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing eselon III dengan eselon II pada **level program** untuk perangkat daerah dan level kegiatan untuk Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja pada eselon III bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon IV

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing eselon IV dengan eselon III pada **level Kegiatan/Sub Kegiatan** pada setiap perangkat daerah. Pengukuran kinerja pada eselon III bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan sasaran kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Pengukuran Kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Pengukuran dilakukan atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan pada e-kinerja BKN pada **level Kegiatan/Sub Kegiatan** pada setiap perangkat daerah yang bersifat **output**. Pengukuran kinerja pada level ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan dan kontribusi serta tingkat ketercapaian kinerja individu terhadap Rencana Hasil Kerja (RHK) yang telah dibagi dari atasan langsung dan dampaknya pada capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan pada pengukuran kinerja SKP Pegawai di aplikasi e-Kinerja BKN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja.

Pengukuran kinerja pada level Kepala Daerah hingga Eselon IV dapat menggunakan matriks sebagai berikut:

Sasaran/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%

Selain dengan matriks di atas, pengukuran kinerja juga wajib dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja di setiap levelnya, seperti:

- Faktor Pendukung;
- Faktor Penghambat;
- Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja; dan
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut.

E. PENUTUP

Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan kinerja yang telah dihasilkan baik kepada atasan maupun masyarakat. Laporan kinerja tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah direalisasikan. Untuk memenuhi laporan kinerja yang lengkap dan akurat tersebut itulah unit kerja dituntut untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebjaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Pengukuran kinerja sebagai bagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah haruslah dilakukan dengan benar, karena hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai sumber dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja secara baik diharapkan dapat menghasilkan informasi kinerja unit kerja secara lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan keharidat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya Dokumen Pengukuran Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024, sebagai penjabaran dan aktifitas selama tahun pelaksanaan pembangunan.

Dokumen ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dokumen Pengukuran Kinerja memuat pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pengukuran Kinerja. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bapperida Kota Samarinda tahun 2024

Dengan adanya Dokumen Pengukuran Kinerja tahun 2024 ini, dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kota Samarinda, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Samarinda, 3 Januari 2025

Kepala Bapperida



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812091988-31004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	5
C. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	6
D. Dasar Hukum	6
BAB II : Gambaran Umum.....	8
A. VISI.....	8
B. MISI.....	8
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
D. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Program.....	10
E. Pengukuran Kinerja Bapperida.....	17
BAB IV : PENUTUP.....	20

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda, sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda Tahun 2024, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan membuat dokumen pengukuran kinerja.

A. LATAR BELAKANG

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Disamping itu "Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi

dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.



Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bukanlah suatu aktifitas yang baru, tiap kementerian, unit kerja dan satuan kerja telah di program untuk mengumpulkan informasi kinerja, baik berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mengetahui sejauh mana visi lembaga sudah tercapai maka diperlukan adanya pengukuran dari kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen/pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap performa organisasi dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*). Alur kinerja pada Pemerintah Kota Samarinda harus berdasarkan pada dokumen perencanaan kinerja yang

tertuang dalam RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan kinerja dilakukan secara *top-down* merujuk pada Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/368/HK-KS/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 2021-2026 dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Eselon III
- Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Perjanjian Kinerja/SKP Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Selanjutnya dari kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara ketercapaian dan target yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi Aparatur Sipil Negara dalam mencapai sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Adapun tujuan umum pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda;
2. Apakah proses bisnis yang diselenggarakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengetahui kekurangan dalam menentukan target kinerja;

4. Mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang telah dilakukan

C. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA

1. Meningkatkan kualitas layanan yang belum optimal serta penentuan *reward* dan *punishment*;
2. Penetapan strategi yang sesuai dengan sasaran kinerja;
3. Penentuan dan alokasi biaya yang tepat untuk mendukung program kegiatan;
4. Sebagai umpan balik pada kemajuan sasaran, jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi maka dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan selanjutnya untuk membuat penyesuaiannya.

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. VISI

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (stakeholder), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Ada pun Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yaitu : **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur Bapperida Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas

keperintahannya. Misi Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat

Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Adapun Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan

2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Adapun tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang mendukung capaian Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel”.
2. Tujuan Kedua “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat”.

Untuk mengukur sejauh mana tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda berdasarkan tujuan dan indikatornya yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel” dapat dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator :
 - Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja
 - b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dengan indikator sebagai berikut :
 - Indeks Inovasi Daerah
2. Tujuan Kedua “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat” dapat dicapai dengan sasaran Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida dengan indikatornya IKM.

Dari rumusan dan penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di Bapperida Kota Samarinda maka strategi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan rencana pembangunan dan pengembangan Kota Samarinda. Program-program dan kegiatan yang direncanakan haruslah bersinergi dan mendukung program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini merupakan keselarasan rangkaian perencanaan baik nasional maupun regional yang prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pembangunan Negara Republik Indonesia.

Badan Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Sedangkan pembangunan daerah terdiri atas RPJD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan renja kerja (renja) perangkat daerah.

Untuk tingkat daerah yang lebih penting lagi mensinergi dokumen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA), karena dalam penyusunan Renstra SKPD dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD disertai dengan target indikator kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Strategi 2: Mengoptimalkan peranan Bapperida dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan.

Optimalisasi peran Bapperida dalam mengakomodir dan mengkoordinasikan program-program RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah ke Renja Perangkat Daerah Untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Program-program yang dicanangkan oleh perangkat daerah haruslah berpedoman pada RPJMD dan Renstra. Hal ini juga sebagai panduan agar program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman perencanaan sehingga hasil yang dicapai dapat terukur secara sistematis, baik untuk kebutuhan pelaksanaan perencanaan kedepan dan pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan.

Strategi 3 Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya.

Pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk

menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang harus digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas, dalam lingkup pengendalian dan evaluasi di kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan. Dalam penyusunan harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan kabupaten/kota itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional.
- 2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada dibawahnya. Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada

tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan serta anggarannya.

- 3) Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan. Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen dibawahnya.

Strategi 4: Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. IKM diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah. Ada beberapa cara untuk meningkatkan penilaian IKM, yaitu :

- a. Mengoptimalkan SDM, pada era sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia mejadi hal yang penting dan krusial. Pasalnya

didalam pengembangan SDM tersebut terdapat pembentukan personil yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Organisasi yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akan berdampak pada performa dan kemajuan organisasi, sehingga pengembangan SDM harus selalu dilakukan dan diprioritaskan.

- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai berbagai tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka Bapperida Kota Samarinda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut kebijakan yang telah dirumuskan di Tabel . untuk mendukung pelaksanaan strategis sebagai berikut :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah, dengan kebijakan :

- a) Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan Indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target Program RPJMD.

- b) Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan.
- c) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan Pusat, Provinsi Kabupten/Kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
- d) Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan

Strategi 2: Mengoptimalkan peranan Bappedalitbang dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan, dengan kebijakan :

Peningkatan verifikasi kesesuaian target dan realisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RPJMD/RKPD

Strategi 3 Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya, dengan kebijakan :

- a) Peningkatan Hasil Evaluasi RKPD
- b) Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD

Strategi 4: Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, dengan kebijakan : Peningkatan kenyamanan kantor agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja Bapperida.

E. PENGUKURAN KINERJA BAPPERIDA SAMARINDA

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib melaksanakan Pengukuran Kinerja sebagai suatu pencapaian target program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja Bapperida Kota Samarinda adalah :

1. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024

Pada tahun 2024 sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda ada 3 sedangkan indikator kinerja ada 3, Tingkat capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024, diperoleh hasil dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,50	21,33	Nilai	99,20
		2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	64	57,12	Nilai	89,25
2.	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM	86	89,78	Nilai	104,39
Rata-Rata							97,61

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,00	21,15	21,20	21,28	21,50	21,33

Sedangkan untuk pengukuran kinerja Tahun 2024 sesuai dengan E Dalev terdapat dalam lampiran ini.

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstara masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bapperida Kota Samarinda.

LAPORAN DALEV BAPPERIDA TW I TAHUN 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RPJMD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (menurut tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)
				K	Rp		Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	
							-1	-1	-1				
5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda											
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1	PERENCANAAN			30.371.524,110	38.243.196,304			5.197.805,613	5.197.805,613	66.635,089,053	16.01	13.59
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			9.451.887,852	12.739.202,500			1.501.109,150	1.501.109,150	21.009,173,666	26.99	11.78
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2	Program Pembinaan Kinerja Program Pembangunan Daerah				88%				90		102.27	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.486.506,732	5.216.812,000			396.836,270	396.836,270	7.906,284,492	64.29	7.61
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan				4 Dokumen				4			100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			3.712.337,408	960.314,875			72000000		1.613.959,719	100	7.5
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Keputusan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen		2					100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			2.288.594,641	1.216.029,150			57495970		1.277.399,232	100	4.73
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen		2					100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			3.227.275,600	149.138,800			126293300		365.618,900	100	84.68
5.01.0.00.0.00.01.0000	5 1 2 2.01					1 Berita Acara		1					100

5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						2	104,225,000			269,655,250			50460750			50,460,750	272,170,250			100	18.71	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	4	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												1			1					100		
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						2	303,180,350			489,327,950			4406950			4,406,950	771,198,300			50	0.9	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	5	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota												1			2					100		
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	6	Penyipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						20000	333,931,500			450,918,450			0		0		565,349,950		0.01	0		
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	6	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan												2			2002				10.01			
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						2	1,516,964,233			1,681,427,525			86179300			86,179,300	3,040,588,141			0	5.13	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.01	7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)												0			2					100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									1,210,994,310		1,927,732,500			72,448,209		72,448,209	2,942,738,904			0	3.76	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02		Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi												0			2					100		
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						5	627,437,860			978,322,000			66115709			66,115,709	1,506,636,054			0	6.76	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)											0			1					100			
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						40	583,556,450			949,410,500			6332500			6,332,500	1,436,102,850			0	0.67	
5.01.0.00.0.00.01.0000			5	1	2	2.02	2	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi												0			80					100		

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4,998,011,399	6,059,566,000		337,166,656	337,166,656	10,177,132,633	0	5.56
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3		Percentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					88%		100			113.64	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3,037,463,633	2,780,450,000		247,403,400	247,403,400	5,378,481,878	0	8.9
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					16 Dokumen 18 Dokumen	1	8			0.49	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3,484,027,339	350,000,000		17347650	17,347,650	759,427,391	0	4.96
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen		1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			20,29,095,000	57,500,000		0	0	63,246,075	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	2	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				20 Laporan		20			100	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					4 29,074,500						57,500,000				0			69,927,500		0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										1 Laporan						1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												800,000,000			131,204,000				1,669,343,282		0	16.4
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pemerintahan											1 Laporan					0					100	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 680,927,863	700,000,000				25,205,150	1,246,827,236	0 3.6		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen							1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat				29 48,446,750	57,500,000			7637000			7,637,000	77,962,750	0 13.2	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	6	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	9 Laporan							9					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat				6 112,022,948	57,500,000			0		0	168,562,048	0 0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	7	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	9 Laporan							9					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 711,516,293	700,450,000			66009600			66,009,600	1,323,185,496	0 9.42	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	8	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan							1					100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0 8.9	
Predikat Kinerja																			SR	SR
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						823,715,541	2,322,444,000				77,772,356	2,776,226,426	0 3.35		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									8					100	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.524.134.129	75.000.000	2448000	2.448.000	582.187.129	0	3.26
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	62.186.000	0	47.978.200	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	2	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	0	54.186.000	2.448.000	51.218.000	0	4.52
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	3	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.523.302.450	1.052.000.000	50363070	830.598.518	0	4.79
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	4	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1		100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5 73,691,500				PAD	50,000,000		35,400,000	3,540,000	123,307,500	40 7.08
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							5 Laporan	2					5			100
Urutan/Keterangan T1.:																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,405,463,722						2,215,209,500		105,110,735	105,110,735	4,534,769,893	18.92 4.74
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06		Jumlah Laporan							5 Laporan	0					5			100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10 39,370,000					PAD	40,000,000		9910000	9,310,000	79,316,000	30 23.28
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							10 Paket	3					10			100
Urutan/Keterangan T1.:																						
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10 947,205,600						715,950,000		9180000	9,180,000	1,647,675,600	30.77 1.28
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							13 Paket	4						13		100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 83,032,000						100,000,000		21896000	21,896,000	182,968,000	0 21.9
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1 Paket						1			100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 68,289,700						119,994,500		38080000	38,080,000	184,804,200	0 31.73
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							1 Paket						1			100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0 0						3,000,000		0	0	0 0 0 0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							1 Dokumen						0			0

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	8	8	Facilitasi Kunjungan Tamu							10 11,200,000				0	0	23,200,000	30	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	3						10			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 1,140,376,422			1,119,265,000		266,44735		26,644,735		2,191,816,093	27.27	2.38
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	15					55				100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	10	10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD				1126 119,990,000		PAD	105,000,000		0	0	0	224,990,000	33.33	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	500				1500					100	
Urutan/Keterangan T1 :																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				787,280,000			724,722,260		0	0	0	1,468,975,000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07			Laporan Rencana Kebutuhan Barang				5 Laporan	0				5					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	5	5	Pengadaan Mebel				44 34,150,000			519,722,260		0	0	0	528,435,000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit					44					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 651,100,000			85,000,000		0	0	0	734,100,000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit					1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 102,030,000			120,000,000		0	0	0	206,440,000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 0					2					10	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				670,546,952			1,304,548,728		153,735,538		153,735,538	1,898,306,953	12.5	11.78	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08			Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				2 Laporan					2					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 403,426,952			436,978,728		103,576,272		103,576,272	833,466,053	25	23.7	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3				12					100	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.267.120.000		867.570.000		50159266	50.159.266	1.064.840.900	0	5.78
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedlakan							2 Laporan				2			100
Rata-reta capaian kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.264.163.142		1.352.165.595		67.777.824	67.777.824	2.565.448.735	10.78	5.01
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							1 Laporan			1				100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.421.744.342		513.770.000		27.998359	27.998.359	910.148.560	29.41	5.45
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							51 Unit		15	51				100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.31.915.600		84.639.595		0	0	102.271.400	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							2 Unit			2				100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.88.552.500		118.920.000		5945000	5.945.000	207.453.500	24.51	5
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							204 Unit		50	204				100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.656.768.500		564.000.000		33834465	33.834.465	1.210.610.965	0	6
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 Unit			2				100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.65.172.200		70.836.000		0	0	134.964.310	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							7 Unit			7				100
Rata-reta capaian kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
																	10.78	5.01	
																	SR	SR	

[illegible]

[illegible]

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					582,094,000		28,787,250		28,787,250		724,000,577		0	4.95
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	-								0					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	1 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					100,000,000		0		0		70,507,300		0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						1 Dokumen		0					0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	3 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					104,500,000		0		0		123,269,600		0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	3 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						1 Dokumen		0					0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					115,161,000		0		7,055,500		103,256,130		0	6.13
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	4 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						1 Dokumen		1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					122,937,000		0		0		115,560,340		0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	6 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral						1 Dokumen		1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					120,114,000		0		5,705,500		116,306,006		0	4.75
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	7 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						1 Dokumen		1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	9 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					114,532,000		0		9,797,500		105,403,110		0	8.55
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	9 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						1 Dokumen		1					100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					100,000,000		0		0		0		0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	10 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan						1 Dokumen		0					0	

LAPORAN DALEV TW II
TAHUN 2024

[illegible]

5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.01	5	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1	0	2	0	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.01	6	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20000 333,931,500	450,918,450	0	0	0	565,349,950	0.01
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.01	6	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20000	Usulan	2	0	0	0	10.01
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 1,516,964,233	1,681,427,525	86179300	336922530	423,101,830	3,040,588,141	0 25.16
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.01	7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rp/RP/MD/RKPD)	2	Dokumen	0	0	2	0	100
Rata-rata capaian kinerja (%)													
Prediktor Kinerja													
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,210,994,310	1,927,732,500	72,448,209	286,731,094	359,179,303	2,942,738,904	0 18.63
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2	Dokumen	0	0	2	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 627,437,860	978,322,000	66115709	130731994	196,847,703	1,506,636,054	0 20.12
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40 583,556,450	949,410,500	6332500	155999100	162,331,600	1,436,102,850	0 17.1
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.02	2	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	0	0	80	0	0	100
Rata-rata capaian kinerja (%)													
Prediktor Kinerja													
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4,754,384,810	5,594,658,000	1,031,824,671	1,036,200,966	2,068,025,637	10,160,150,270	66.67 36.96
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	1	Jumlah Dokumen Evaluasi	6	Dokumen	1	0	6	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 3,979,296,810	4,612,378,000	863520671	922970966	1,786,491,637	8,442,119,770	50 38.73
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	1	1	4	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	23 54,319,500	80,000,000	36744000	6500000	43,244,000	132,759,500	100 54.06
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	2	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	Kerja Sama	0	1	1	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 770,768,500	902,280,000	131560000	106730000	238,290,000	1,585,271,000	50 26.41
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	2	2.03	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	1	1	4	0	100

Rata-rata capaian kinerja (%)																	66.67	36.96
Predikat Kinerja																	S	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																	43.65	30.53
Predikat Kinerja																	SR	SR
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						4,998,011,399	6,059,666,000				765,987,970	1,103,154,626	10,177,132,693	0 18.2
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)							88%					100		113.64
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						3,037,463,693	2,780,450,000				446,984,122	694,387,522	5,378,481,878	0 24.97
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							16 Dokumen	1				8		0.49
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						3,484,027,339	350,000,000				71480613	88,828,263	759,427,391	0 25.38
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							1 Dokumen					1		100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						20,29,095,000	57,500,000	0			15914375	15,914,375	63,246,075	0 27.68
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							20 Laporan			0		20		100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						4,29,074,500	57,500,000	0			15104750	15,104,750	69,927,600	0 26.27
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							1 Laporan					1		100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						1,942,352,940	800,000,000				78851160	210,055,160	1,669,343,282	0 26.26
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan							1 Laporan	0				1		100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1,680,927,863	700,000,000				167741300	192,946,450	1,246,827,236	0 27.56
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							1 Dokumen					1		100

[illegible]

5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1,136,832,225	956,772,000		11,990,900		120,747,300	132,738,200	2,022,424,329	0	13.87
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											10		62.5	
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1	107,353,800	150,000,000	5870900		60442800	66,313,700	246,807,500	0	44.21
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1						1			100
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					0		64,186,000	0		2011000	2,011,000	46,151,000	0	3.13
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					4						4			100
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					0		100,186,000	0		49500000	49,500,000	95,406,000	0	49.41
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					4					0	4			100
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					1	1,029,478,425	642,400,000	6120000		8793500	14,913,500	1,634,059,829	0	2.32
5.01.0.00.0.00.01.00																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	3	2.03	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Infrastruktur					1						1			100

Rata-rata capaian kinerja (%)																				53.33	51.33			
Predikat Kinerja																				R	R			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,409,463,722		2,215,209,500		105,110,735		237,167,237		342,277,972	4,534,769,893	57.07	15.45			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan					5 Laporan				0		2	5			100				
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 39 370,000			40,000,000	PAD	9310000			0	9,310,000	79,316,000	90	23.28			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							10 Paket		3		6	10			100				
					Uraian/Keterangan T1 :																			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 947,205,600			718,950,000			9180000		20790000		29,970,000	1,647,675,600	92.31	4.17		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							13 Paket		4		8	13			100				
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 83,032,000			100,000,000			21896000		23040000		44,936,000	182,968,000	0	44.94		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 68,289,700			119,994,500			38080000		16559500		54,635,500	184,804,200	0	45.54		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							1 Paket					1			100				
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0	0		3,000,000		0		0	0	0	0	0	0	0		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							1 Dokumen					0			0		0		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 11,200,000			12,000,000			0		0	0	23,200,000	90	0	0		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 1,140,376,422			1,119,265,000			26644735		131527737		158,172,472	2,191,816,093	90.91	14.13		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							55 Laporan		15		35	55			100				
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1126 119,990,000			105,000,000	PAD	0			45250000		224,990,000	93.33	43.1			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.06	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1500 Dokumen		500		900	####			100				
					Uraian/Keterangan T1 :																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				57.07	15.45			
Predikat Kinerja																				R	SR			
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				787,280,000			724,722,260			0		0	0	1,468,975,000	0	0	0		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.07	Laporan Rencana Kebutuhan Barang							5 Laporan		0		0	5			100				
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.07	Pengadaan Mebel				44 34,150,000			519,722,260			0		0	0	528,435,000	0	0	0		
5.01.0.00.0.00.01.00	5	1	1	2.07	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							44 Unit					44			100				

[illegible]

Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	33.93
Predikat Kinerja																	SR	SR
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					243,535,567	307,090,800		19,599,000	45,644,000	65,243,000	524,033,637	0	21.25
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	Jumlah Dokumen Kelitbitan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				6 Dokumen						0		0	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial				0	102,678,367	103,830,500	1420000	0	1,420,000	195,723,997	0	1.37
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0		100,000,000	0	0	0	0	0	100
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	3	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1 Dokumen						0		0	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0		100,000,000	0	0	0	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	5	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			1 Dokumen						0		0	0
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			0			100,000,000	10727000	40900000	51,627,000	91,745,500	0	51.63
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	6	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1 Dokumen						1		100	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				0		100,000,000	0	0	0	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	9	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			1 Dokumen		0				0		0	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			2	140,857,200		103,260,300	7452000	4744000	12,196,000	236,564,140	0	11.81
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.02	10	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			1 Dokumen						1		100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	21.25
Predikat Kinerja																	SR	SR
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					193,776,900	582,094,000	28,787,250		24,786,341	53,573,591	724,000,577	0	9.2
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	-				-						0		100	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1	70,507,300	100,000,000	0	0	0	0	70,507,300	0	0
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	1	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1 Dokumen						0		0	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			2	123,269,600	104,500,000	0	0	0	0	123,269,600	0	0
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	3	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			1 Dokumen						0		0	
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			0	0	115,161,000	7055500		2575000	9,630,500	103,256,130	0	8.36
5.01.0.00.0.00.01.00	5	5	2	2.03	4	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1 Dokumen						1		100	

[illegible]

TAHUN 2024

卷

Rata-rata capaian kinerja (%)																				85.72	44.11	
Predikat Kinerja																				T	SR	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															2,942,738,904	100	44.37
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi															2	100	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)															100	45.45
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)															100	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Peranglat Daerah															100	43.26
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.02	2	Jumlah Orang yang Dilbina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi															100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100	44.37	
Predikat Kinerja																				ST	SR	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																83.33	60.07
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	1	Jumlah Dokumen Evaluasi															100	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota															75	64.19
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan															100	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah															100	62.43
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	2	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya															100	
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															75	38.82
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5	1	2	2.03	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah															100	

Rata-rata capaian kinerja (%)														83.33	60.07				
Predikat Kinerja														T	R				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN AMBANGAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																			
Predikat Kinerja																			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN					4,998,011,399	6,059,666,000		337,166,656		765,987,970	1,241,665,136	2,344,839,762	10,177,132,633	0	38.7
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Persentase Keterlaksanaan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)				88%								100		113.64	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3,037,463,633	2,780,450,000		247,403,400		446,984,122	629,505,272	1,323,892,794	5,378,481,878	0	47.61
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					16 Dokumen 18 Dokumen			1			5	8		0.49	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang Pemerintahan					3,484,027,339	350,000,000		173,476,500		714,806,13	489,254,1	137,753,804	759,427,391	0	39.36
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					20,29,095,000	57,500,000		0		1,591,437,5	1,460,200	17,374,575	63,246,075	0	30.22
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									0			20		100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					4,29,074,500	57,500,000		0		151,047,50	32,294,50	18,334,200	69,927,600	0	31.89
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												1		100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					1,942,352,940	800,000,000		131,204,000		7,885,1160	11,999,483,2	330,049,992	1,669,343,282	0	41.26
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan								0		0		1		100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1,680,927,863	700,000,000		250,051,50		16,774,1300	15,952,7300	352,473,750	1,246,827,236	0	50.35

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rata-rata capaian kinerja (%)															0 25.33
Predikat Kinerja															SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)															0 38.7
Predikat Kinerja															SR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1			16,521,624,859	19,444,327,804	3,359,529,807	4,691,306,438	4,144,515,854	12,195,352,099	35,448,782,754	52.21	62.72			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai			81.83			89.78		104.4				
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149,154,450	250,000,000	16,560,000	57,532,700	51,303,300	125,396,000	395,556,021	94.44	50.16			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01	Nilai AKIP				0			73.25		89.88				
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 59,994,600	125,000,000 PAD	4320000	23340200	30239800	57,900,000	184,939,600	100	46.32			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			3	3		6		100				
Uraian/Keterangan T1 :															
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 59,673,000	75,000,000 PAD	6480000	14030000	10078500	30,588,500	132,469,571	83.33	40.78			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01 6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			3		2	6		100				
Uraian/Keterangan T1 :															
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 29,486,850	50,000,000 PAD	5760000	20162500	10985000	36,307,500	78,146,850	100	73.82			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.01 7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			3		1	4		100				
Uraian/Keterangan T1 :															
Rata-rata capaian kinerja (%)															94.44 50.16
Predikat Kinerja															ST
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,216,026,593	13,317,681,721	3,016,345,710	3,820,146,373	2,799,132,339	9,635,624,422	24,286,726,152	60	72.35			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02	Jumlah Laporan	3 Laporan			0		9	9		300				
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		74 9,984,510,866	12,013,506,000 PAD	2769707102	3423490373	2523917339	8,726,114,814	21,752,430,856	100	72.64			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 1	Jumlah Orang yng Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan			74	74		74		100				
Uraian/Keterangan T1 :															
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 1,157,824,227	1,254,175,721 PAD	243098608	372200000	247650000	862,948,608	2,410,987,796	0	68.81			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen						2		100				
Uraian/Keterangan T1 :															
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 73,691,500	50,000,000 PAD	3540000	24456000	18565000	46,561,000	123,307,500	80	93.12			
5.01.0.00.0.00.0 1.0000	5 1 1 2.02 5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			2	1	1	5		100				

Urutan/Keterangan T1 :										50000000		PAD		60 72.35							
Rata-rata capaian kinerja (%)												R		S							
Predikat Kinerja																					
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,215,209,500		105,110,735		237,167,237	521,867,353	864,145,325	4,534,769,893	58.32	39.01		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan				5 Laporan			0		2	1	5		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 39,370,000	40,000,000	PAD	9310000		0	10620000	19,930,000	79,316,000	90	49.83		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket			3		6		10		100			
Urutan/Keterangan T1 :										40000000		PAD									
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 947,205,600	718,950,000		9180000		20790000	214570000	244,540,000	1,647,675,600	92.31	34.01		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket			4		8		13		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 83,032,000	100,000,000		21896000		23040000	0	44,936,000	182,968,000	0	44.94		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket							1		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 68,289,700	119,994,500		38080000		16559500	12762900	67,402,400	184,804,200	0	56.17		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket							1		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 0	3,000,000		0		0	0	0	0	0	0		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen						0	0		0			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu				10 11,200,000	12,000,000		0		0	12000000	12,000,000	23,200,000	100	100		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan			3		6	1	10		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 1,140,376,422	1,119,265,000		26644735		131527737	256634453	414,806,925	2,191,816,093	90.91	37.06		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan			15		35		55		100			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1126 119,990,000	105,000,000	PAD	0		45250000	15280000	60,530,000	224,990,000	93.33	57.65		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.06	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen			500		900		1500		100			
Urutan/Keterangan T1 :										150000000		PAD									

Rata-rata capaian Kinerja (%)																	58.32	39.01		
Predikat Kinerja																	R	SR		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												232.710.000	1.468.975.000	30.3	32.11
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Laporan Rencana Kebutuhan Barang						0								100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel						0						232.710.000	528.435.000	90.91	44.78
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											40			100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												0	734.100.000	0	0
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	1 Unit												0			
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												0	206.440.000	0	0
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	2															
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														10	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.07	2															
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	30.3	32.11		
Predikat Kinerja																	SR	SR		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												361.116.693	1.898.306.953	41.67	60.87
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	2															
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												109.486.693	833.466.053	83.33	66.69
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	4															
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												251830000	1.064.840.900	0	57.93
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.08	4															
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	41.67	60.87		
Predikat Kinerja																	SR	R		
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												178.386.169	2.565.448.735	80.76	40.19
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.09	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah														100	
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.09	1															
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												82882169	150.195.892	92.16	29.23
5.01.0.00.0.00.0.1.0000	5	1	1	2.09	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															100

Rata-rata capaian kinerja (%)																				80,76	40,19		
Predikat Kinerja																				T	SR		
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														102.271.400	100	40.62	
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pektisnarnya																	
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															207.453.500	90,2	32,8
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								50	100	34	204						
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															1.210.610.965	50	55,21
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									1		2						
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															134.964.310	71,43	11,93
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									3	2	7						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80,76	40,19		
Predikat Kinerja																				T	SR		
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															299.000.000	0	0
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.05		Jumlah Pegawai																100	
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															299.000.000	0	0
5.01.0.00.0.00.0.000.0000	5	1	1	2.05	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80,76	40,19		
Predikat Kinerja																				T	SR		

[illegible]

[illegible]

TAHUN 2024

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP/MD/RKPD)	2	1.516,964,233	1.681.427,525	86179300	336972530	165688295	934833783	1,523,623,908	3,040,598,141	100	90.61
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.01	7			2	Doku men		0	0	2		2		100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.210.994,310	1,927,732,500	72,448,209	286,731,094	496,202,972	876,362,369	1,731,744,594	2,942,738,904	100	89.83	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02													100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi		2	Doku men		0		2		2		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		5 627,437,860	978,322,000	66115709	130731994	247787722	434562769	879,196,194	1,506,636,054	100	89.87	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					0	1		1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		40 583,556,450	949,410,500	6332500	155999100	248415200	441799600	852,546,400	1,436,102,850	100	89.8	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	2	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			80 Orang		0	80			80		100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		4,754,384,810	5,594,658,000	1,031,824,671	1,096,200,966	1,292,882,391	2,044,857,432	5,405,765,460	10,160,150,270	100	96.62	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	1	Jumlah Dokumen Evaluasi			6	Doku men	1			5	6		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		4 3,979,296,810	4,612,378,000	863520671	922970966	1174226391	1502104932	4,462,822,960	8,442,119,770	100	96.76	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			4	Lapora n	1	1	1	1	4		100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		23 54,319,500	80,000,000	36744000	6500000	6700000	28496000	78,440,000	132,759,500	100	98.05	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	2	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				0	1			1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		4 720,768,500	902,280,000	131560000	106730000	111956000	514256500	864,502,500	1,585,271,000	100	95.81	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4	Lapora n	1	1	1	1	4		100	

Rata-rata capaian kinerja (%)															100	96.62
Predikat Kinerja															ST	ST
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)															95.71	90.72
Predikat Kinerja															ST	T
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,998,011,399	6,059,666,000	337,166,656	765,987,870	1,241,665,136	2,834,301,472	5,179,121,234	10,177,132,633	100	85.47	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3				88%				100	100		113.64		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3,037,463,633	2,780,450,000	247,403,400	446,984,122	629,505,272	1,017,125,451	2,341,018,245	5,378,481,878	100	84.2	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		16 Doku men 18 Doku	1		5	2	8			0.49	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,484,077,339	350,000,000	173,476,500	71,806,13	489,255,41	1,376,462,48	275,400,052	759,427,391	100	78.69	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Doku men				1	1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20,29,095,000	57,500,000	0	159,14375	146,0200	167,76500	34,151,075	63,246,075	100	59.39	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		20 Lapora n	0	0		20	20			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,29,074,500	57,500,000	0	151,04750	322,9450	225,18900	40,853,100	69,927,600	100	71.05	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Lapora n				1	1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1,942,352,940	800,000,000	131,204,000	788,51160	119,954,832	396,940,350	726,090,342	1,665,343,282	100	90.87	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Rencana/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan		1 Lapora n	0	0		1	1			100	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 680,927,863	700,000,000		25205150		167741300	159527300		213425623	565,899,373	1,246,827,236	100	80.84	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												1	1			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				29 48,446,750	57,500,000	7637000			0	21879000		0	29,516,000	77,962,750	100	51.33	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	6	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												9	9			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 112,022,948	57,500,000	0				6666600	44040000		5832500	56,539,100	168,562,048	100	98.33
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	7	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												9	9			100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 711,516,293	700,450,000	66009600			91225324	230448949		223985330	611,669,203	1,323,185,496	100	87.33	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	8	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia												1	1			100	

Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	84.2				
Produk Kinerja																			ST	T				
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)														1,173,939,617	1,952,510,885	2,776,226,426	100	84.07	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen							6	2	8								100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	524,134,129	75,000,000	2448000	6472900	27164100									21968000	58,053,000	582,187,129	100	77.4
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen								1	1								100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	0		62,186,000	2448000	1224000	9126100									37628000	47,978,200	47,978,200	100	77.15
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	4 Laporan								4	4								100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	0		54,186,000	2448000	0	3160000									45610000	51,218,000	51,218,000	100	94.52
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan								1	1								100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan			1,052,000,000	50563070	144892948	186297350									396742700	778,296,068	830,598,518	100	73.98
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan								1	1								100	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	69,635,768	250,000,000	21289286	42802700	62591667									116959502	243,643,155	313,278,923	100	97.46
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen								1	1								100	

[illegible]

[illegible]

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)															100	85.47
Predikat Kinerja															ST	T
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	16,521,624,859	19,444,327,804	3,359,529,807	4,691,306,438	4,144,515,854	6,731,805,796	18,927,157,895	35,448,782,754	93.93	97.34	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1			86 Nilai		81.83			89.78			104.4		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149,154,450	250,000,000	16,560,000	57,532,700	51,303,300	121,005,571	246,401,571	395,556,021	100	98.56	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Nilai AKIP		81.50 Nilai		0			73.25	73.25		89.88		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 59,994,600	125,000,000	49,200,000	233,402,000	302,998,000	670,450,000	124,945,000	184,939,600	100	99.96	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Doku men		3	3			6		100		
Uraian/Keterangan T1 :																
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 59,673,000	75,000,000	648,000	1,403,000	1,007,850	42,208,071	72,796,571	132,469,571	100	97.06	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Lapora n		3		2	1	6		100		
Uraian/Keterangan T1 :																
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 29,486,850	50,000,000	576,000	2,016,250	1,098,500	11,752,500	48,660,000	78,146,850	100	97.32	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Lapora		3		1		4		100		
Uraian/Keterangan T1 :																
Rata-rata capaian Kinerja (%)															100	98.56
Predikat Kinerja															ST	ST
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,216,026,593	13,317,681,721	3,016,345,710	3,820,146,373	2,799,132,339	3,435,075,137	13,070,699,559	24,286,726,152	100	98.15	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Laporan		3 Lapora		0		9		9		300		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		74 9,984,510,866	12,013,506,000	27,697,071,02	342,349,037,3	253,291,733,9	304,180,517,6	11,767,919,990	21,752,430,856	100	97.96	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 Orang/ bulan		74	74	74		74		100		
Uraian/Keterangan T1 :																
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 1,157,824,227	1,254,175,721	243,098,608	372,200,000	247,650,000	390,214,961	1,253,163,569	2,410,987,796	100	99.92	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Doku men					2	2		100		
Uraian/Keterangan T1 :																
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 73,691,500	50,000,000	35,400,000	244,560,000	185,650,000	305,500	49,616,000	123,307,500	100	99.23	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Lapora n		2	1	1	1	5		100		
Uraian/Keterangan T1 :																

S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	102,090,000	120,000,000		0	0	0	104410000	104,410,000	206,440,000	10	87.01	
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					20						2			10		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah				670,546,952		1,304,548,728		153,735,538		279,181,764		433,726,006	1,227,760,001	1,898,306,953	100	94.11
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.08		Laporan Penyediaan Jasa Penunjang					2	Lapora					2			100		
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	403,426,952	436,978,728		103576272		78367630		138613506	430,039,101	833,466,053	100	98.41
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Lapora	n	3		6		2		100		
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1	267,120,000	867,570,000		50159266		200819134		295112500	797,720,900	1,064,840,900	100	91.95
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2	Lapora	n			2			100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				1,264,153,142		1,352,165,595		67,777,824		297,278,364		757,853,236	1,301,295,593	2,565,448,735	100	96.24
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					1	Lapora						1		100		
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20	421,744,342	513,770,000		27998359		39315364		338208326	488,404,218	910,148,560	100	95.06
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					51	Unit		15		30		4	51		100	
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perkiraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	31,915,600	84,639,595		0		7200000		35975800	70,355,800	102,371,400	100	83.12
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	Unit			1				2		100	
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45	88,552,500	118,920,000		5945000		9640000		79896000	118,901,000	207,453,500	100	99.98
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					204	Unit		50		100		20	204		100	
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1	656,768,500	564,000,000		33834465		232673000		242431000	553,842,465	1,210,610,965	100	98.2
S.01.0.0.0.0.0. 01.0000	5	1	1	2.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2	Unit			1		1	2		100	

[illegible]

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				96.55	93.25
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				ST	ST
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												846,569,740	2,287,967,600	4,042,945,163	78.13	86.08		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												846,569,740	2,287,967,600	4,042,945,163	78.13	86.08		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan												84.6	84.6		112.8			
															</						

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						249,535,567	307,090,800		19,599,000		45,644,000		188,783,940		26,471,130		290,498,070		524,093,637		50	91.34	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	Jumlah Dokumen Kelitnangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	6 Doku men															0					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0 102,678,367	103,830,500	1420000									0	70690000		20935630		93,045,630		195,723,997		100	89.61	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Doku men														1		1				100		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	100,000,000	0									0	0			0	0	0	0	0	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	3 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Doku men															0					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	5 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	100,000,000	0									0	0			0	0	0	0	0	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	5 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Doku men																0				0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	6 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	100,000,000	10727000								40900000	37849000				2269500	91,745,500	91,745,500		100	91.75		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	6 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Doku men														1		1				100		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	9 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	100,000,000	0								0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	9 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Doku men						0										0				0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 140,857,200	103,260,300	7452000								4744000	80244940				3266000	95,706,940	236,564,140		100	92.69		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	10 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Doku men														1		1				100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Prediktor Kinerja																												
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	193,776,900	582,094,000	28,787,250								24,786,341	182,985,450			293,684,636		530,223,677		724,000,577		62.5	91.09	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	-	-															0					100		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 70,507,300	100,000,000	0								0	0				0	0		70,507,300		0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Doku men																0					0	0

[illegible]

[illegible]